

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya terdapat berbagai macam suku dan budaya. Dengan wilayah yang sedemikian luas dan diikuti jumlah penduduk yang besar, tentu sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatur masyarakatnya yang menyebar diberbagai wilayah. Maka dari itu disaat pemerintahan orde baru dimulai, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralistik yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

Retribusi daerah atau retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang berguna untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau komersial. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pembangunan daerah. Selain itu, keduanya bersifat wajib untuk dipenuhi oleh masyarakat. Retribusi daerah adalah imbalan atas jasa atau pemberian izin khusus oleh pemerintah daerah untuk tujuan perorangan atau organisasi. Retribusi parkir merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan. Retribusi mengharuskan adanya ketaatan masyarakat dalam memberikan imbalan kepada petugas. (Setiaji, Santoso 2016).

Munawir menegaskan bahwa retribusi merupakan kontribusi

pemerintah yang dapat diamanatkan dan dialokasikan langsung kepada layanan yang ditentukan. Retribusi merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pejabat retribusi kepada wajib pajak, dengan pemungutan yang bersifat memaksa. Retribusi berbeda dengan pajak, karena pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada individu oleh negara, yang ditujukan untuk tujuan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Retribusi berbeda dengan retribusi, yang berfungsi sebagai komponen pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk inisiatif pembangunan.

Seiring dengan perkembangan zaman sistem sentralistik yang dulu diterapkan di Indonesia telah memunculkan berbagai masalah, seperti: peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua daerah di Indonesia yang membuat tidak sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya. Sehingga dalam menangani setiap permasalahan pemerintah tidak dapat secara cepat dan tepat, pemerintah juga dinilai kurang bisa tanggap dan cepat didalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rumah tangga suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di suatu wilayah tertentu yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan agar pemerintah daerah dapat membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah, yang mencerminkan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan pajak, retribusi

daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan penerimaan tambahan yang jumlahnya ribuan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah, namun dalam praktiknya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengkaji dan menambah pendapatan daerah, khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan sumber lain yang sah, yang dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, dengan mengacu pada asas desentralisasi.¹

Melihat berbagai masalah tersebut, dengan didasarkan atas ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, dan ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

¹ Batubara, Hamidun, Marwan Lubis, And Muhammad Husni Malik Hasibuan. 2019. "Kajian Potensi Retribusi Parkir Di Kota Medan." *Semnastek Uisu*: 2-7

Indonesia (NKRI), maka pemerintah saat ini telah memberikan otonomi kepada daerah dan hal itu dituangkan dalam UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan sumber lain yang sah, yang dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, dengan mengacu pada asas desentralisasi.

Kaitannya dengan otonomi daerah, maka salah satu tantangan utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah bagaimana memahami semua potensi yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan berbagai potensi yang ada sebagai landasan berpijaknya. Maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah mengoptimalkan potensi daerah pada sektor perparkiran yang dinilai cukup signifikan didalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).²

Sektor perparkiran merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk digali pemerintah daerah dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).Meningkatnya kendaraan setiap tahun, karena banyak kendaraan dari luar Kota Kudus yang masuk ke Kota Kudus, menyebabkan

² Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). Pengantar Teori Pembangunan. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022. Hlm: 97

betapa pentingnya bagi pemerintah daerah untuk mengatur sektor parkir. Jika satu kawasan tidak menyediakan lahan parkir, tentu akan terjadi kesemrawutan karena orang-orang akan memarkirkan kendaraan mereka dengan seenaknya, bahkan mungkin juga di jalan, yang nantinya akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Suatu kenyataan bahwa kendaraan tidak selalu bergerak pada suatu saat pasti akan berhenti. Maka, kendaraan yang berhenti dalam waktu sesaat akan membutuhkan lahan untuk tempat parkir. Kemudian keberadaan lahan yang khususnya di perkotaan sangat terbatas.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat Judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Kudus” Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Kudus?
2. Apakah faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Kudus?

C. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan atas peraturan perundang-undangan khususnya peraturan tentang kesehatan yang berlaku dan keadaan fakta di lapangan terkait dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi

Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Kudus” (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan KabupatenKudus), dan ini beberapa contoh kesamaan dari tesis ini.

Berikut beberapa kesamaan dari :

Nama Pengarang	Judul	Perbedaan
SITI AIRINDA MARENNU (2022)	ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR	a. Penelitian ini hanya membahas aktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi
FATIMAH AZ ZAHRA (2024)	ANALISIS KEBUTUHAN RUANG PARKIR PADA RUMAH SAKIT UMUM IMELDA PEKERJA INDONESIA MEDAN	a. Penelitian ini hanya membahas bagaimana karakteristik ruang parkir pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan? b. Bagaimana kebutuhan ruang parkir pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan?

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan dengan judul judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Kudus” (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus), ternyata belum pernah dilakukan dan dibuat oleh peneliti lain dalam judul tersebut, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini

Keaslian penelitian ini berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan khususnya peraturan tentang parker

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Kudus.
2. Untuk mengetahui apa saja factor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berbentuk karya ilmiah dan menjadi perbandingan penelitian selanjutnya untuk Fakultas Hukum UMK Kudus.

2. Secara Teoristis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Peraturan Daerah ataupun Undang-Undang yang berlaku.

3. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuandalam berfikir secara ilmiah dan kemampuan menuliskan secara ilmiah dengan mengkaji teori.

Untuk Masyarakat dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan karena akan ada peningkatan pelayanan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan tradisi tersendiri dalam ilmu sosial yang terutama bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan lingkungannya dengan menggunakan bahasa dan kosakata mereka sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditandai dengan kerangka deskriptif eksploratif. Kirk dan Miller mengklasifikasikan pendekatan ini.³ (Moleong, 2001:3)

Sedangkan Rony Kuntor menyatakan:

“Penelitian deskriptif merupakan pendekatan metodologis yang memberikan gambaran atau penjelasan yang jelas tentang suatu situasi tanpa mempengaruhi masalah yang sedang diselidiki.”⁴

Konsisten dengan perspektif ini, Bog dan Taylor menggolongkan pendekatan kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dari individu dan tindakan yang diamati.

Pendapat lain dikemukakan oleh Masri Singarimbun yaitu:

“Studi deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat proses sosial tertentu. Penelitian merumuskan konsep dan mengumpulkan data

³ Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya: Bandung. 2001. Hlm : 3

⁴ Kountur, R.. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: PPM. 2003, Hlm: 95

tetapi tidak mengevaluasi hipotesis. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis; penelitian ini hanya menggambarkan kejadian yang terkait dengan variabel, gejala, atau kondisi, disertai dengan interpretasi”.⁵

2. Fokus Penelitian

Menemukan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena fokus memandu penerapan pengamatan dan membatasi ruang lingkup penyelidikan, terutama karena penekanannya biasanya abstrak dalam jenis penelitian ini.

I Gusti Ngurah Agung menyatakan bahwa menetapkan fokus memiliki tujuan:

- a) Menetapkan fokus penelitian membatasi studi, menjadikan lokasi penelitian layak sementara pada saat yang sama membatasi cakupan ke domain atau kategori yang menghasilkan data atau informasi substansial dari area tertentu.
- b) Penentuan fokus yang efektif menciptakan parameter bagi sumber informasi untuk menyaring data yang masuk, memastikan bahwa temuan tersebut memiliki signifikansi dan nilai strategis bagi informan.⁶

Penelitian ini berpusat pada rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Parkir Kota Kudus?

⁵ Singarimbun, Masri dan Shofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES., Hlm: 4

⁶ Kountur, R.. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: PPM. 2003, Hlm: 24-25

Penelitian ini berfokus pada tahap implementasi, dimana penulis menerapkan model yang dikemukakan oleh George Edward III, yakni menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni :

1. Komunikasi, menyangkut bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan masyarakat, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya, menyangkut ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia. Hal ini menyangkut kemampuan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakannya secara efektif.
3. Kemauan para pelaksana, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi/Organisasi yang melaksanakan Implementasi Kebijakan Publik.⁷

3. Sumber data

Data yang digunakan untuk topik penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk data primer dan sekunder, menurut Lofl dan Lyon. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ekspresi verbal dan perilaku, sedangkan sumber data tambahan meliputi dokumen dan berbagai materi.

⁷ Nugroho Riant. 2009. Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : Gramedia, Hlm: 511-513

- a. Data primer diperoleh melalui informan khususnya petugas parkir dan pejabat Dinas Perhubungan Kota Kudus.
- b. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen termasuk undang-undang, peraturan, referensi, data statistik, dan laporan pemerintah.⁸

Sumber data primer diperoleh dari individu yang dianggap memiliki informasi penting (informan kunci) tentang topik yang diteliti. Informasi penting tersebut melibatkan pejabat struktural di UPT Parkir, berbagai personel di UPT Parkir Kota Kudus, dan petugas/petugas parkir di lapangan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Studi lapangan merupakan penelitian langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data dan fakta di lokasi penelitian melalui pengamatan, pengamatan, dan pengamatan :

- a. Wawancara

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi .

Seperti yang diungkapkan Hadari Nawawi yaitu:

“Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi melalui serangkaian pertanyaan lisan yang memerlukan jawaban lisan. Ciri utama wawancara adalah keterlibatan langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan penyedia informasi.”⁹

⁸ Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya: Bandung. 2001.Hlm : 112

⁹ Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008.Hlm: 111

Sejalan dengan pendapat diatas, Metode wawancara menurut

Moh. Nazir adalah:

“Prosedur perolehan informasi untuk penelitian melalui pertanyaan dan jawaban langsung antara pewawancara dan responden, memanfaatkan instrumen yang dikenal sebagai Panduan Wawancara”.¹⁰

Wawancara terstruktur dilakukan terhadap anggota Muspida, pejabat Dinas Perhubungan, dan pejabat Parkir di lingkungan Kota Kudus.

b. Observasi

Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian memungkinkan dilakukannya pemeriksaan yang cermat terhadap kondisi sebenarnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang topik yang diteliti. Penulis mengevaluasi kinerja petugas lapangan dan personel di Dinas Perhubungan Kota Kudus.

c. Dokumentasi

Data ini mencakup dokumen atau catatan dalam berbagai format yang relevan dengan judul penelitian, termasuk statistik demografi, rincian mengenai dimensi area parkir, informasi tentang pemungut biaya parkir, data tentang kendaraan bermotor yang memanfaatkan layanan parkir, dan informasi penting lainnya yang terkait dengan penelitian.

¹⁰ Nazir. (1988). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm: 234

5. Tehnik Analisis Data

Menurut Siddel proses berjalannya tehnik analisis data adalah sebagai berikut

- 1) Mencatat pengamatan untuk menghasilkan catatan lapangan, yang kemudian diberi kode untuk pemrosesan data.
- 2) Mengumpulkan, mengatur, mengkategorikan, mensintesis, mengerahkan upaya, dan membuat indeks.
- 3) Kognisi, melalui identifikasi pola relasional dan perumusan kesimpulan yang luas.¹¹

Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk meneliti data, dengan tujuan memberikan deskripsi terperinci tentang fenomena tertentu. Alasan penggunaan teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Kompeten dalam menganalisis data tingkat tinggi dan terperinci yang dikumpulkan dari berbagai interaksi dan peristiwa sosial, khususnya yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.
- b. Analisis deskriptif dapat mengevaluasi temuan dari insiden di lokasi penelitian, dengan tujuan pengembangan konseptual lebih lanjut.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi analisis data seperti yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (1992:27), yang terdiri dari tiga fase dalam pendekatan analisis data:¹³

¹¹ Seidel, J. V. (1998). *Qualitative Data Analysis*. Originally Published as *Qualitative Data Analysis*, in the *Ethnograph v5.0: A Users Guide*, Appendix E, 1998, Colorado, page:64

¹² Winarno Surakhmad. 2001. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, hlm: 14

¹³ Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Hlm: 27

1. Reduksi data

Proses pemilihan, isolasi, penyederhanaan, validasi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah metode analitis yang menyempurnakan, mengategorikan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang tidak perlu, dan mengatur data untuk memudahkan pengambilan dan verifikasi kesimpulan akhir.

2. Analisis dan Penyajian data

Setelah data direduksi, informasi disajikan dalam format terstruktur yang memudahkan pengambilan kesimpulan lebih lanjut. Penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti memahami keseluruhan data dan komponen-komponen pentingnya. Bentuk naratif digunakan untuk penyajian data kualitatif.

Penyajian data melibatkan penjelasan metode model implementasi seperti yang digambarkan oleh George Edward III.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pengambilan kesimpulan melibatkan verifikasi berkelanjutan di seluruh proses penelitian, dimulai dari awal dan berlanjut selama sintesis temuan. Hal ini dicapai dengan menyaring esensi serangkaian hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, diskusi terfokus, dokumentasi, dan materi pendukung lainnya.

6. Tehnik Keabsahan Data

Tehnik keabsahan data ini mengacu pada Kriteria keabsahan data dapat di lihat sebagai berikut :¹⁴

a. Tehnik Memeriksa Derajat Kepercayaan

Teknik ini memudahkan penelitian untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil penelitian. Teknik yang digunakan untuk memastikan keandalan temuan penelitian meliputi :

1) Ketekunan Pengamatan

Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri unsur masalah atau isu yang dimaksud dan selanjutnya memvalidasi dirinya secara rinci tentang aspek-aspek tersebut. Pengamatan yang disebutkan dalam contoh ini dilakukan secara ketat pada sumber data primer dan sekunder.

2) Triangulasi

Metodologi ini menilai validitas data melalui triangulasi, yang melibatkan perbandingan data dengan informasi yang diperoleh dari banyak sumber pada berbagai fase penelitian, jangka waktu, dan metodologi.

3) Kecukupan Referensi

'Referensi' berarti memberikan bukti untuk mendukung data yang ditemukan peneliti. Sebaiknya ada rekaman audio wawancara untuk mendukung data, dan dokumentasi untuk mendukung

¹⁴ Moleong, J.L. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., hlm: 34

deskripsi situasi. Data peneliti akan lebih kredibel jika menggunakan metode ini.

4) Teknik Memeriksa Ketergantungan

Dalam penelitian kualitatif, pengujian ketergantungan dilakukan melalui tinjauan komprehensif terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti sering kali mengabaikan penelitian lapangan namun mampu menyediakan data. Penelitian ini memerlukan pengujian ketergantungan.

5) Teknik Memeriksa Kepastian

Dalam penelitian kualitatif, konsep kepastian selaras dengan ketergantungan, yang memungkinkan penerapan secara bersamaan. Pendekatan ini memerlukan audit menyeluruh atas proses penelitian. Penilaian kepastian memerlukan evaluasi hasil penelitian dalam kaitannya dengan metodologi penelitian, yang memastikan proses tersebut tetap teliti.

7. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024. Lokasi penelitian berada di lingkungan Pemerintah Kota Kudus yaitu di Dinas Perhubungan Kota Kudus yang meliputi UPT Parkir dan Kawasan Parkir Kota Kudus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul peran dinas perhubungan terkait dengan parkir, maka sistematika terdiri dari 4 bab seperti di

bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, metode yang dipakai dalam penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini di jelaskantentang tinjauan umum mengenai peran, tinjauan umum tentang pengawasan, tinjauan umum tentang parkir

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuatinti permasalahan yang akan dibahas berdasarkan dari rumusan masalah,

BAB IV : PENUTUP

Di bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis yang sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan.